

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah pembangunan menuju pada industrialisasi dibidang pertanian melalui pengembangan agribisnis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan dengan lebih dahulu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Terutama masyarakat pertanian, sehingga kesinambungan dan ketangguhan petani dalam pembangunan pertanian bukan saja diukur dari kemampuan petani dalam memmanage usahanya sendiri, tetapi juga ketangguhan dan kemampuan petani dalam mengolah sumber daya alam secara rasional dan efisien, berpengetahuan, terampil, cakap dalam membaca peluang pasar dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dunia khususnya perubahan dalam pembangunan pertanian. Disinilah pentingnya penyuluhan pertanian untuk membangun dan menghasilkan sumber daya petani yang berkualitas serta hasil usahatani yang dapat memenuhi kebutuhan hidup (Deptan, 2006:3).

Pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis pertanian merupakan tugas yang tidak ringan sehingga Kementerian Pertanian salah satunya menetapkan jagung, beras, kedelai, daging sapi dan gula menjadi komoditas pangan utama yang diberikan perhatian secara khusus dalam pencapaian target swasembada berkelanjutan (Deptan, 2006:3). Upaya untuk mencapai itu semua diperlukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang baik, selanjutnya dibutuhkan kelembagaan, ketenagaan yang kompeten, mekanisme dan tata kerja yang jelas termasuk supervise, monitoring dan evaluasi yang efektif dan pembiayaan yang memadai. UU No. 16 Thun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K) sebagai wujud revitalisasi penyuluhan pertanian, telah mengatur penyelenggaraan penyuluhan yang baik. Untuk implementasi UU BP3K tersebut mengkehendaki kearifan local dari otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut peran penyuluh pertanian diposisikan pada posisi yang strategis di manakelembagaan

penyuluhan pertanian berada dan dapat berhubungan langsung dengan Bupati, sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian betul-betul terkoordinir dan bias berjalan efektif dan efisien (Deptan, 2006:3).

Penyuluh pertanian merupakan sarana kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk mendorong pembangunan pertanian di lain pihak, petani mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak saran yang diberikan agen penyuluhan pertanian. Dengan demikian penyuluhan hanya dapat mencapai sasarannya jika perubahan yang diinginkan sesuai dengan kepentingan petani (Ilham, 2010:1). Peran penyuluh sangat berat, mengharuskannya memiliki kemampuan tinggi. Oleh karena itu, kualitas dari penyuluh harus ditingkatkan sehingga mampu dalam berperan dalam memberikan penyuluhan dan mewujudkan pembangunan pertanian. Peranan agen penyuluhan pertanian adalah membantu petani membentuk pendapatan yang sehat dan membuat keputusan yang baik dengan cara berkomunikasi dan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan petani (Suhardiyono, 1992:29).

Provinsi Gorontalo yang memiliki komoditas unggulan daerah yaitu padi sawah mementingkan pendapatan hasil usaha padi sawah yang dijalankan petani. Akan tetapi tercatatnya jumlah ekspor padi pada Tahun 2013 cenderung menurun (BPS Gorontalo, 2013:1). Tentunya hal ini membutuhkan pengembangan usahatani, khususnya tanaman padi sebagai komoditas andalan Provinsi Gorontalo, dengan adanya penyuluhan diharapkan dapat membantu petani dalam mengolah serta mengembangkan lahan pertaniannya sehingga dapat memberikan sumber pendapatan petani padi sawah. Untuk itu perlu didorong dan memfasilitasi penumbuhan sistem dan ushatani berbasis tanaman padi sawah di wilayah Provinsi Gorontalo dengan pendekatan pemanfaatan asset yang dimiliki petani, yaitu sumberdaya lahan dan sumberdaya tenaga kerja secara optimal.

Keberadaan penyuluh pertanian di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dianggap penting oleh masyarakat, diakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyuluhan tersebut. Masyarakat yang umumnya megandalkan ilmu bercocok tanam dari nenek moyang mereka

mengakibatkan kendala yang serius dalam penyampaian penyuluhan hal ini terbukti dengan kurangnya kehadiran beberapa anggota kelompok tani yang di adakan oleh pihak penyuluh di Kecamatan Kabila.

Kelembagaan penyuluh yang terus mengalami perubahan menuntut penyuluh cepat beradaptasi dengan kondisi lingkungan kerja yang baru. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja penyuluh. Diharapkan kelembagaan penyuluh kedepan relative mapan seperti halnya Badan Pusat Statistik yang tetap berada dibawah Sekretariat Negara, sehingga para pegawainya dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, mulai dari tingkat pusat hingga desa.

Melalui peran penyuluh diharapkan dapat mengembangkan sistem agribisnis berbasis komoditas tanaman, yang dapat melakukan perubahan orientasi usahatani dari peningkatan produktivitas komoditi pokok melalui pemanfaatan yang tersedia lahan, tanaman serta prosedur menanam padi sawah yang tepat dengan membuat materi yang selalu baru dan praktamis. Melalui peran ini maka tradisi panen disini oleh petani di Kecamatan Kabila berkurang.

Dari beberapa uraian tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana “Kinerja Penyuluh Dalam Maningkatkan Kesejahteraan Petani Padi Sawah di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran penyuluh pertanian di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango?
2. Bagaimana pengaruh karakteristik penyuluh terhadap kinerja penyuluh pertanian pada usahatani padi sawah di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui peran penyuluh pertanian di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
2. Menganalisis karakteristik pengaruh kinerja penyuluh pertanian pada usahatani padi sawah di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Penulis, Membuka wawasan pengetahuan penulis dan merupakan wadah dalam meningkatkan keterampilan serta mampu menganalisis dan melaporkan masalah-masalah yang terjadi.
2. Bagi penyuluh pertanian, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya meningkatkan kinerja penyuluh pertanian pada usahatani padi sawah.
3. Bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan penyuluhan pada pertanian dengan mempertimbangkan sistem pendanaan yang dapat mempengaruhi kinerja para penyuluh pertanian.